

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Indopos

Seharusnya Jadi Tanggungan Pemprov

WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani, mengusulkan penggratisan biaya pendidikan sekolah swasta siswa tak mampu. Penggratisan ditujukan bagi siswa kurang mampu yang ditolak oleh sistem seleksi jalur zonasi PPDB 2020/2021.

"Saya setuju sistem zonasi untuk pemerataan akses pendidikan setiap warga, mendapatkan yang terbaik namun itu tidak boleh diskriminatif," tutur Zita yang juga Koordinator Komisi E DPRD DKI itu. Menurutnya, banyak siswa yang harus putus sekolah karena terpinggirkan oleh sistem.

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) setidaknya ada 106 siswa yang gagal lolos PPDB akibat sistem seleksi syarat usia. Ratusan siswa itu sudah dilaporkan ke Dinas Pendidikan DKI. Zita meminta Pemprov DKI lewat Dinas Pendidikan supaya bisa menggratiskan siswa tersebut menempuh pendidikan di sekolah swasta.

Terlebih kondisi saat ini tak sedikit masyarakat yang perekonomiannya terdampak akibat pandemi Covid-19. "Daerah yang tidak seberlimpah DKI Jakarta saja mampu gratisan seperti di Brebes. Ini tanggung jawab kita semua sebagai wakil rakyat. Jadi, yang tidak mampu tidak boleh putus sekolah, masuk swasta harus dibantu," ucapnya.

Ribuan Kursi Kosong

Di satu sisi PPDB Jakarta menyingkirkan sekian banyak siswa di bawah umur, namun di satu sisi ternyata 7.758 kursi sekolah negeri masih kosong alias belum terisi penuh oleh peserta didik. Rinciannya, persentase kursi sisa paling banyak terdapat pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD). Pemprov DKI mencatat 6.666 kursi kosong usai PPDB Jakarta ditutup.

"Untuk SD sebanyak 6.666 kursi sekitar 6,71 persen dari daya tampung yang disediakan. Perlu disampaikan di sini, lokasi beberapa SD



ada di daerah-daerah yang lingkungan perkantoran sehingga usia anak-anak yang masuk SD ini di daerah situ sudah tidak banyak," kata Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana.

Sementara jumlah bangku yang tidak terisi di bangku SMP dan SMA relatif lebih sedikit daripada SD. Jumlahnya tidak mencapai 1 persen. "SMP itu ada 0.79 persen (622 kursi), untuk SMA 0.07 persen (225 kursi) dan untuk SMK ada 1,72 persen (245 kursi)," kata Nahdiana.

Menurutnya, kursi kosong ini tidak terdapat



Daerah yang tidak seberlimpah DKI Jakarta saja mampu gratisan seperti di Brebes."

Zita Anjani
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta

di semua sekolah. Kursi kosong ini hanya dialami di beberapa sekolah yang terletak di Kepulauan Seribu atau kawasan perkantoran. Secara keseluruhan, PPDB Jakarta tahun ajaran 2020 - 2021 menerima 211.908 siswa sekolah negeri. Rinciannya, 92.728 siswa SD, 78.453 siswa SMP, 31.739 siswa SMA dan 8.988 siswa SMK.

Menurut Nahdiana, jika dibandingkan tahun lalu, PPDB kali ini meratakan variasi nilai di tiap sekolah. Ia menyebut, tidak ada lagi satu sekolah dengan variasi nilai beragam. (dmi)